

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI RABU / 18 November 2020

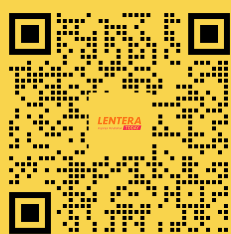
HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

Bayangkan jika semua orang mau mendengarkan anak, menghormati dan mencintainya, maka kita bisa membuat perbedaan besar bagi seluruh generasi.

Kate Middleton,
Anggota Kerajaan Inggris

ANIES BASWEDAN TERSANDUNG PETAMBURAN



SCAN ME

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menjalani pemeriksaan Selasa (17/11) di Polda Metro Jaya, terkait kerumunan acara Habib Rizieq Shihab di Petamburan. Hampir 10 jam diklarifikasi, Anies mengaku dicecar 33 pertanyaan. Kepolisian

akan mengungkap bila ada temuan tindak pidana dalam waktu 2-3 hari ke depan. Jika dugaan tersebut terbukti ada ancaman Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dengan sanksi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Tak hanya itu Kemendagri juga berjanji akan memberikan hukuman tegas bila dugaan terbukti.

Baca Hal 11



DAFTAR SANKSI BAGI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN PSBB JAKARTA

Melansir informasi resmi Pemprov DKI Jakarta, peraturan sanksi terhadap pelanggaran protokol Kesehatan akan ditambah dengan mekanisme sanksi progresif terhadap pelanggaran berulang berdasarkan Pergub Nomor 79 Tahun 2020

Penegakan diiplin ini dilakukan bersama oleh TNI, Polri, Satpol PP, dan organisasi perangkat daerah terkait

PASAL 93 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG KARANTINA KESEHATAN

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

BERIKUT BEBERAPA SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN :

PELANGGARAN PEMAKAIAN MASKER

- Tidak memakai masker 1 kali > Kerja sosial 1 jam atau denda Rp. 250.000
- Tidak memakai masker 2 kali > Kerja sosial 2 jam atau denda Rp 500.000
- Tidak memakai masker 3 kali > Kerja sosial 3 jam atau denda Rp. 1000.000

PENGATURAN PELAKU USAHA TERKAIT PROTOKOL KESEHATAN

- Ditemukan kasus positif > Penutupan paling sedikit 3x24 jam untuk penyemprotan disinfektan
- Melanggar protokol Kesehatan 1 kali > Penutupan paling lama 3x24 jam
- Melanggar protokol Kesehatan 2 kali >

Denda administratif Rp 50.000.000

- Melanggar protokol Kesehatan 3 kali > Denda administratif Rp. 100.000.000
- Melanggar protokol kesehatan 4 kali > Denda Administratif Rp. 150.000.000
- Terlambat membayar denda lebih dari 7 hari > Pencabutan izin usaha

CATAT, ADA 2 OBAT DAN 14 HERBAL UNTUK PASIEN CORONA BERIZIN BPOM

Jakarta- BPOM telah memberikan izin edar darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk dua obat yang bisa digunakan untuk pasien corona. Mereka yaitu Favipiravir dan Remdesivir.

"Dua obat ini sudah mendapatkan hasil uji klinik yang telah dipublikasikan secara internasional. Sudah mendapatkan data yang cukup yang dipercaya dapat meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian pasien COVID-19," kata Kepala Badan POM, Penny Kusumastuti Lukito dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11).

Favipiravir merupakan obat dalam bentuk tablet, sedangkan Remdesivir bentuknya serbuk injeksi. Favipiravir diberikan untuk pasien bergejala ringan hingga sedang (usia 18 tahun lebih). "Sementara Remdesivir untuk pasien gejala berat yang dirawat di rumah sakit," ungkap dia. BPOM juga telah memberikan persetujuan EUA untuk 7 industri farmasi terkait dua obat ini.

Selain obat, BPOM juga telah melakukan pendampingan terhadap 14 komponen herbal sebagai imunomodulator atau pendamping pengobatan pasien COVID-19. Ke-14 produk ini juga tengah menjalani uji di sejumlah RS.

Izin Klorokuin untuk Covid-19 Dicabut

Di sisi lain, BPOM RI mencabut persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) obat yang mengandung Hydroxychloroquine Sulfate untuk

pengobatan Covid-19. Selain itu, BPOM juga mencabut izin edar dari obat-obatan yang mengandung Chloroquine Phosphate untuk pengobatan Covid-19.

"Benar. Kedua obat tersebut dicabut EUA-nya (untuk pengobatan COVID-19) dengan pertimbangan karena risikonya lebih besar dari manfaatnya," kata Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Dra Togi Junice Hutadjulu Apt, MHA.

Togi mengatakan, pencabutan EUA dan izin edar kedua obat ini sudah melalui berbagai tahap pengkajian. Bahkan data yang diperoleh untuk pengkajian ini didapatkan langsung dari rumah sakit. "Pencabutan EUA obat ini sudah melalui proses pengumpulan data langsung dari rumah sakit (farmakovigilans aktif), pengkajian secara statistik dan pembahasan berulang kali dengan tim ahli, perwakilan Organisasi Profesi dan pemanggilan Industri farmasi," jelasnya.

Berdasarkan edaran yang diterima, pihak BPOM menghimbau untuk obat yang mengandung Hydroxychloroquine Sulfate dan Chloroquine Phosphate ini agar tidak digunakan lagi dalam pengobatan Covid-19. (ist,ins)

PRODUSEN OBAT CORONA YANG DAPAT IZIN BPOM

- Favipiravir dengan nama dagang Avigan diproduksi oleh Fujifilm Toyama Chemical Jepang/PT Beta Pharmaco.
- Favipiravir oleh Kimia Farma.
- Remdesivir dengan nama dagang Cofivor

diproduksi oleh Hetero India/Amarox Pharma.

- Remdesivir dengan nama dagang Desrem oleh Mylan India/Indo Farma
- Remdesivir dengan nama dagang Jubi-R oleh Jubilant India/Dexa Medica
- Remdesivir dengan nama dagang Remdac oleh Cadila Healthcare India/PT Kimia Farma
- Remdesivir dengan nama dagang Cipremi oleh Cipta India/PT Soho Industri Farmasi.

HERBAL UNTUK CORONA YANG DAPAT IZIN BPOM

- Cordycep dan Deteflu
- Ekstrak daun jambu biji
- Health tone oil
- Avimac
- Virgin coconut oil
- Ekstrak etanol ketopeng China
- Golerend, Penglar
- Minyak atsiri daun ecalyptus
- Awer-awer
- Innamed COV
- Jamu purwarupa
- Vipalboemin
- Bejo
- Health tone.

OBAT YANG DICABUT IZINNYA UNTUK PENANGANAN CORONA

- Mengandung Hydroxychloroquine Sulfate
- Mengandung Chloroquine Phosphate

ZONA MERAH BERTAMBAH, ANGKA KESEMBUHAN MAKIN RENDAH



Jakarta- BPOM telah memberikan izin edar darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk dua obat yang bisa digunakan untuk pasien corona. Mereka

perkembangan kasus kesembuhan minggu ini dalam YouTube Setpres, Selasa (17/11).

yaitu Favipiravir dan Remdesivir.

"Mengenai perkembangan kasus sembuh, pada pekan lalu saya menyampaikan bahwa sudah 3 minggu berturut-turut kasus sembuh kita mengalami perlambatan dengan harapan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah bahu membahu untuk meningkatkan angka kesembuhan di wilayahnya masing-masing," kata Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menyampaikan update

"Namun sangat disayangkan bahwa ternyata pada pekan ini angka kesembuhan masih juga menurun sehingga pekan ini menjadi pekan keempat penurunan kesembuhan secara berturut-turut," imbuhnya.

Wiku menyebut jumlah kesembuhan pada pekan ini mengalami perlambatan sebesar 9,3 persen hampir 10 persen. Bahkan perlambatan penurunan kasus sembuh itu lebih besar dari pekan sebelumnya. "Ini adalah kondisi yang memprihatinkan seharusnya jumlah kesembuhan harus terus kita jaga agar terus bertambah," ungkapnya.

Sementara itu persentase terendah di tingkat nasional adalah Papua 51,36 persen, Lampung 51,97 persen, Jambi 68,23 persen,

ADA 37 RUU KANDIDAT PROLEGNAS 2021, DARI RUU MINOL HINGGA BPIP

Jakarta-Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan pihaknya sudah menginventarisasi sebanyak 37 Rancangan Undang-undang (RUU) yang bakal masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Diantaranya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang telah diusulkan diubah judulnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)/ Selain itu ada juga RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Namun, Willy berkata, tidak semua RUU tersebut akan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021, mengingat capaian legislasi DPR sangat rendah dan target legislasi sudah ditetapkan.

"Belum [diputuskan], besok Raker. [Tadi hanya pemaparan] pemaparan tim ahli. Raker baru besok (Rabu, 18/11)," kata Willy, Selasa (17/11). Willy membeberkan sebanyak 37 RUU tersebut berasal dari tiga usulan yang berbeda yakni 27 usulan DPR, sembilan

usulan pemerintah dan satu usulan DPD.

Jika tak selesai 2020, maka bisa jadi prioritas tahun selanjutnya. Willy Aditya menjelaskan, proses RUU Minol misalnya saat ini baru penjelasan pengusul soal urgensi RUU dan akan masuk tahap harmonisasi sore nanti. Setelah penjelasan pengusul, maka proses selanjutnya adalah kajian tim ahli lalu dibentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas secara spesifik.

"Baru penjelasan pengusul. Sekarang fasenya adalah kajian tim ahli, setelah kajian tim ahli baru masuk ke Panja, di Panja dibahas, habis Panja nanti pleno Baleg. Iya kalau oke, kalau enggak ya gugur lah," katanya.

Jika dilanjutkan untuk dibahas, maka prosesnya tergantung dinamika perdebatan di Panja. Jika tak ada perdebatan berarti, maka RUU Minol akan disahkan tingkat di Panja. Kemudian dibawa ke Badan Musya-

warah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan pengesahan tingkat II (rapat paripurna). Jika masuk paripurna, artinya RUU Minol sah menjadi UU.

Kendati demikian, Willy yang juga Wakil Ketua Fraksi NasDem itu berpendapat pihaknya menilai larangan minuman alkohol sebaiknya diatur di dalam Perda. Dengan surat edaran Mendagri sebagai payung hukumnya. "Fraksi NasDem berpandangan terhadap RUU ini cukup diatur di dalam perda, melalui payung hukum surat edaran Mendagri. Kalau dalam pandangan fraksi ya, cukuplah perda, karena kan kita memiliki dinamika yang berbeda-beda," pungkasnya.

RUU Larangan Minuman Beralkohol memicu pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang menilai RUU tersebut belum perlu dan berpotensi mematikan usaha UMKM. Sementara dari pengusul RUU itu dapat menyelamatkan anak bangsa. (ist)

DAFTAR 37 RUU KANDIDAT PROLEGAS PRIORITAS 2021

USULAN DPR RI

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI
3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI
4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI
5. RUU tentang perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usulan Komisi IV DPR RI
6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI
8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI
9. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, usulan Komisi VIII DPR RI
11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI
12. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI

13. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, usulan Komisi XI DPR RI
14. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI
15. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah dari awalnya RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI
16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI
19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
20. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg
21. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI
22. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI

23. RUU tentang Profesi Psikologi (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI
24. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI
25. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI
26. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI
27. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI

USULAN PEMERINTAH

1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
5. RUU tentang Ibukota Negara
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
7. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

USULAN DPD RI

1. RUU tentang Daerah Kepulauan



BUNTUT TUDINGAN KE GUBERNUR JATIM

EKS-KEPALA BAPPEKAB JEMBER TERANCAM KENA SANKSI

JEMBER -Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meminta Plt Bupati Jember KH Muqit untuk segera menjatuhkan sanksi penurunan pangkat kepada mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Jember Achmad Imam Fauzi. Keputusan ini setelah tim Pemprov Jatim melakukan pemeriksaan atas pernyataan Fauzi dalam hearing bersama Komisi C DPRD Jember, 5 Oktober 2020. Dalam hearing tersebut, Fauzi mengatakan keterlambatan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota se-Jatim karena kelalaian Gubernur Jatim.

Hal tersebut terungkap dari surat Gubernur Khofifah tertanggal 19 Oktober 2020 nomor : 739/1977/060/2020 kepada Plt Bupati Jember. Dalam surat itu hukuman untuk Fauzi adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun dan pembinaan secara intensif.

Sekretaris Daerah Pemkab Jember



Kepala Bappekab Jember Achmad Imam Fauzi

Mirfano menjelaskan, dirinya sebagai atasan langsung dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menindaklanjuti surat Gubernur Jatim tersebut. Hanya saja, pihaknya tidak serta merta menjatuhkan

sanksi kepada Fauzi. "Kami masih akan melakukan pemeriksaan kembali soal itu," kata Sekda Mirfano, Selasa (17/11).

Dia menambahkan, eks-Kepala Bappekab juga sebenarnya sudah dipanggil beberapa kali untuk dimintai keterangan. Termasuk pihak-pihak yang turut hadir dalam hearing saat itu. Sejauh ini dari keterangan yang ada, ia mengaku belum menemukan bukti yang cukup untuk menjatuhkan sanksi kepada Fauzi.

Pihaknya masih akan memanggil kembali Fauzi yang diagendakan pekan depan. Sekda Mirfano juga mengatakan, pihaknya akan membuat nota dinas dan kemudian hasilnya dilaporkan kepada Plt Bupati Jember. Selanjutnya, jika Fauzi terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan surat Gubernur itu, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang ada. (mok)

LAGI-LAGI KEPALA DAERAH DITAHAN KPK, KINI GILIRAN WALIKOTA DUMAI

Jakarta- Sesuai pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri bahwa akan ada dua kepala daerah yang ditahan dalam waktu dekat, Walikota Dumai Zulkifli AS resmi ditahan. Dia langsung digelandang usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dumai pada APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka ZAS selama 20 hari terhitung sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan 6 Desember 2020 di rutan Polres Metro Jakarta Timur," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers, Selasa (17/11).

Zulkifli ini menjadi kepala daerah kedua yang ditahan KPK dalam kurun waktu dua minggu terakhir. Sebelumnya, ada Bupati Labuhanbatu Utara Khairuddin yang juga ditahan oleh KPK pada 10 November lalu.

Kasus ini bermula pada Meret 2017. Saat itu Zulkifli bertemu dengan Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di sebuah hotel di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Zulkifli meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Dumai. Setelahnya, terjadi pertemuan berikutnya antara Zulkifli dengan Yaya. Dalam kesempatan itu, Yaya menyatakan sanggup mengurusnya dengan fee 2 persen dari jumlah DAK yang cair. Lalu, Pemkot Dumai mengajukan pengurusan DAK Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 22 miliar.

"Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang

dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan," kata Alex.

Pemkot Dumai kemudian mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. Beberapa bidang yang diajukan antara lain RS rujukan, jalan, perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, dan pendidikan.

Zulkifli kembali bertemu dengan Yaya terkait usulan itu. Yaya pun menyanggupinya untuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 Kota Dumai. DAK itu untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp 20 miliar dan pembangunan jalan sebesar Rp 19 miliar.

"Untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, ZAS memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemerintah Kota Dumai," kata Alex.

Diduga atas adanya sejumlah bantuan itu, Yaya menerima Rp 550 juta sebagai fee. Fee itu diduga dari uang yang dikumpulkan oleh Zulkifli dari pihak swasta yang jadi rekanan proyek Pemkot Dumai.

"Penyerahan uang setara dengan Rp 550 juta dalam bentuk Dolar Amerika, Dolar Singapura dan Rupiah pada Yaya Purnomo dkk dilakukan pada bulan November 2017 dan Januari 2018," sambungnya.

Selain kasus suap, Zulkifli juga dijerat dengan kasus penerimaan gratifikasi. Ia diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 juta dan juga fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai. Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018. Atas



Walikota Dumai Zulkifli AS ditahan KPK usai diperiksa

KEPALA DAERAH TERSANGKA KORUPSI DI 2020

- Bupati Sidoarjo Saiful Ilah (Januari 2020) Dalam OTT, uang senilai total Rp 1.813.300.000, disita KPK TERKAIT dugaan kasus suap terkait proyek infrastruktur Selasa (7/1/2020).
- Bupati Kutai Timur Ismunandar (Juli 2020) Dalam OTT Kamis (2/7/2020) ditemukan duit Rp 170 juta dan beberapa tabungan dengan total Rp 4,8 miliar diduga terkait suap pekerjaan infrastruktur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2019-2020.
- Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman (Oktober 2020) Jadi tersangka kasus dugaan suap ke mantan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo per Jumat (23/10/2020). Tersangka diduga memberi uang total sebesar Rp 400 juta terkait dengan pengurusan DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018
- Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah alias Buyung (November 2011) Ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi mafia anggaran Selasa (10/11/2020). Kharuddin disebut memberikan gratifikasi senilai Rp 400 juta dan SGD 290 ribu kepada Yaya Purnomo terkait dana alokasi khusus (DAK) Labuhanbatu Utara 2018.

perbuatannya, Zulkifli disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Tipikor. (ist)

BAWASLU: BERTAMBAH 398, TOTAL ADA 1.448 KAMPANYE LANGGAR PROKES

Jakarta-Bawaslu menindak sekitar 398 kegiatan kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas yang melanggar protokol kesehatan (Prokes) pada 10 hari kelima masa kampanye periode 5-14 November 2020. Sehingga total kegiatan yang dinyatakan melanggar protokol corona selama 50 hari masa kampanye ada 1.448.

Anggota Bawaslu Afifuddin menjelaskan, dari 398 tindakan Bawaslu tersebut, 381 berupa penerbitan surat peringatan dan 17 pembubaran kegiatan kampanye. Pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi adalah kerumunan orang tanpa jaga jarak, tidak menggunakan masker maupun tidak tersedianya fasilitas cuci tangan/hand sanitizer.

"Pembubaran dilakukan baik pengawas pemilu, satuan polisi pamong praja (Satpol PP), maupun kepolisian berdasarkan rekomendasi Bawaslu," ucap Afif dalam rilisnya, Selasa (17/11).

Pembubaran sebenarnya dilakukan jika peringatan atas pelanggaran protokol kesehatan tidak dihiraukan. Selain itu, ada pula penyelenggara kampanye yang berinisiatif membubarkan kegiatan setelah diberi peringatan oleh pengawas pemilu.

Sejauh ini, total ada 17.738 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang di-

selenggarakan pada periode 10 hari kelima kampanye.

Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada masa 10 hari keempat kampanye. Pada periode 26 Oktober sampai 4 November 2020, terdapat 16.574 kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas. Pada periode itu pun terdapat penindakan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan sekitar 333.

Sejak awal tahapan kampanye, Bawaslu mendorong pasang calon kepala daerah maupun tim pemenangan untuk mengurangi kegiatan kampanye yang memungkinkan tatap muka terlebih menyebabkan kerumunan orang.

Bawaslu mendorong kegiatan kampanye dengan metode daring digiatkan secara maksimal. Selain itu, Bawaslu juga merekomendasikan semua pihak untuk mematuhi protokol kesehatan jika memang kampanye tatap muka atau pertemuan terbatas harus diselenggarakan.

Bawaslu meminta penyelenggara kampanye senantiasa menyediakan penyanitasi tangan dan menerapkan jaga jarak bagi peserta kampanye.

Beberapa langkah pembubaran kampanye berujung pada kekerasan terhadap pengawas pemilu yang melakukan pem-

bubaran. Misalnya seperti kekerasan verbal yang diterima Panitia Pengawas Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Bahkan, dijelaskan pada periode kampanye 5 hingga 14 November itu, setidaknya ada 31 orang pengawas pemilu mendapat kekerasan saat menjalankan tugas. Khususnya dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan tersebut. (ist)

DATA PELANGGARAN 50 HARI KAMPANYE

TOTAL SELAMA 50 HARI MASA KAMPANYE : 1.448 MELANGGAR

Periode 5-14 November 2020:

Total kampanye tatap muka: 7.738 kegiatan
Total pelanggaran : 398 kegiatan

Sanksi:

381 penerbitan surat peringatan
17 pembubaran kegiatan kampanye

Jenis Pelanggaran Berat:

31 orang pengawas pemilu mendapat kekerasan (19 orang kekerasan verbal dan 12 orang kekerasan fisik).

DEBAT PUBLIK KE-2 PILBUP BLITAR

PETAHANA PROTES KPU KARENA BOLEHKAN PASLON PENANTANG BACA CONTEKAN

BLITAR- Calon Wakil Bupati petahana Marhaenis Urip Widodo memprotes KPU pada saat Debat Publik Ke-2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020. Pihaknya keberatan karena paslon penantang nomor urut 2 diperbolehkan membaca contekan.

Protes ini disampaikan Cawabup Marhaenis yang berpasangan dengan Cabup Rijanto, pada saat sesi saling tanya atau debat terbuka. Cabup Rijanto menanggapi jawaban paslon Rini Syarifah (Mak Rini) - Rahmat Santoso (Makdhe Rahmat) terkait startegi meningkatkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Blitar. "Saya ingin menyampaikan kritik kepada KPU, agar dilakukan secara fair dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi," kata Marhaenis.

Demikian juga ketika melanjutkan jawaban Cabup Rijanto mengenai inovasi mengatasi kesulitan air bersih, bagi warga Blitar Selatan. "Kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada KPU, kasihan Mak Rini kalau harus membaca disaksikan audience warga Kabupaten Blitar seperti itu. Seharusnya dimanfaatkan untuk menunjukkan kemampuan secara utuh dan rasional, jadi tolong KPU yang fair jangan pakai kerpekan (contekan,Red). Saya juga kasihan kadang



pertanyaan dan jawaban tidak nyambung. Semoga debat yang ketiga nanti berjalan lebih baik," tandasnya.

Protes ini sempat ditanggapi oleh Cabup Mak Rini, meskipun saat debat membaca teks karena memang dibantu dan dikendalikan oleh tim. "Sehingga ketika nanti kami jadi bupati dan wakil bupati tidak berjalan

sendiri, tapi berkolaborasi dengan tim kami yang handal dan profesional," untkapnya.

Menanggapi protes dari paslon Nomor urut 1, Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso mengaku akan menjadikan hal ini bahan evaluasi. "Karena memang tidak ada aturan yang melarang atau membolehkan membaca kerpekan saat debat," kata Hadi.

Oleh karena itu, ketika ini dianggap tidak fair maka akan dibahas lebih lanjut oleh KPU. Sebagai persiapan pelaksanaan Debat Publik Ke-3 pada akhir bulan (November) ini. "Karena memang debat ini cukup besar pengaruhnya, dalam upaya sosialisasi akan digelar Pilbup Blitar pada 9 Desember 2020 mendatang. Terbukti warga yang tahu akan adanya Pilkada 9 Desember meningkat, pasca debat pertama. Semoga setelah debat kedua ini, bisa meningkat sampai 50 persen dari total pemilih," pungkasnya.

Sementara itu secara umum pelaksanaan Debat Publik Ke-2 Pilbup Blitar, Senin(16/11) malam, dengan tema lingkungan hidup dan kesehatan ini berjalan cukup menarik. Pertanyaan dari panelis menyinggung isu-isu terbaru yakni limbah dari Pabrik Gula PT RMI, Penambang Pasir Ilegal, Air Bersih, Bencana Alam, Indeks Kesehatan dan Pandemi Covid-19.(ais)

Lagu "Bad Guy"

**BILLIE EILISH LAMPAUI 1 MILIAR
TAYANGAN DI YOUTUBE**



Lagu "Bad Guy" Billie Eilish telah melampaui angka satu miliar penayangan di YouTube pada Rabu (11/11) waktu setempat, demikian dilansir Variety.

Lagu tersebut kini masuk dalam daftar klub miliar penayangan, "Bad Guy" sendiri berhasil meraih angka tersebut setelah satu setengah tahun dirilis.

"Bad Guy" adalah lagu pertama dari Billie Eilish yang masuk dalam daftar video musik bergengsi, sementara kolaborasinya dengan Khalid, "Lovely" masih berada di angka 900 juta penayangan.

Video musik "Bad Guy" disutradarai oleh Dave Meyers, dan ini bukan pertama kalinya bagi Meyers berhasil membuat video yang masuk dalam jajaran klub elit. Karya lain dari Meyers adalah "Senorita" dari Shawn Mendes dan Camila Cabello.

Meyers juga membuat video untuk selebriti terkenal lainnya yang telah mengumpulkan ratusan juta penayangan, termasuk "ME!" Taylor Swift, "God Is a Woman" dari Ariana Grande dan "HUMBLE" dari Kendrick Lamar.

"Bad Guy" merupakan salah satu lagu tunggal dari album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", sebuah album yang

menempatkan Eilish dalam sejarah Grammy. Dia berhasil memenangkan lima dari enam nominasi di awal tahun ini termasuk Artis Baru Terbaik, Album Terbaik, Rekaman dan Lagu Terbaik tahun ini.

Dia adalah artis kedua, setelah Christopher Cross pada tahun 1981 sebagai pemenang termuda dalam pertunjukan Grammy yang berhasil membawa pulang empat piala.

Sementara itu, "Despacito" yang merupakan lagu kolaborasi antara Luis Fonsi dan Daddy Yankee masih menjadi pemimpin dalam klub miliaran penayangan di YouTube. Dengan lebih dari tujuh miliar tampilan, "Despacito" berada pada urutan teratas bahkan audio remix tanpa video musiknya telah mengumpulkan lebih dari 650 juta penayangan.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell (18 tahun) adalah seorang penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Pada 2016, Eilish merilis single debutnya, "Ocean Eyes" yang kemudian menjadi viral.

Eilish dibesarkan di Highland Park, Los Angeles dari keluarga aktor dan musisi. Orang tuanya adalah Maggie Baird dan Patrick O'Connell yang memiliki keturunan Irlandia dan Skotlandia. Ia bersekolah di rumah dan

bergabung dengan Paduan Suara Anak-anak Los Angeles pada usia delapan tahun

Selain terkenal dengan style nyentrik yang khas, artis muda dan bertalenta ini berhasil membawakan lagu yang banyak disukai kalangan luas. Menariknya lagi, berbagai pencapaian fantastis atas karyanya terjadi dalam waktu yang relatif singkat saja.

Hingga tahun 2019 ini, nama Billie Eilish sudah menyabet berbagai penghargaan seperti MTV Video Music Awards, Nickelodeon Choice Awards, Teen Choice Awards, Danish Music Awards, dan masih banyak lagi.

Hebatnya, ia tercatat dalam Forbes 30 Under 30 tahun 2018 atas prestasi dan dampak karya yang mendunia mengingat usianya masih di bawah 20 tahun!

Billie Eilish termasuk salah satu artis yang sering menyuarakan tentang body shaming. Pada bulan Mei 2020 yang lalu, dirinya pernah merilis film pendek yang berjudul Not My Responsibility, yang mengomentari opini publik tentang tubuh dan penampilannya.

Film Billie Eilish tersebut membawa pesan yang kuat agar tidak malu terhadap tubuh, karena merupakan otoritas terhadap kita sepenuhnya (Ant).



Foto : besthealthmag.ca

MENGENALI PENYEBAB CEGUKAN DAN CARA MENGATASINYA

Cegukan terjadi saat diafragma Anda yakni otot yang memisahkan paru-paru dan perut tiba-tiba dan tanpa sengaja berkontraksi, kata Dr. Melvin Look, dokter sekaligus konsultan bedah di Mount Elizabeth Novena Hospital..

Kontraksi ini menarik udara ke paru-paru dan jika kondisi ini terjadi tiba-tiba saat kotak suara Anda berkontraksi, muncullah suara yang berbunyi seperti "hic".

Menurut Look, seperti dilansir dari Channel News Asia, Senin, penyebab diafragma bisa mengalami hal ini belum diketahui secara jelas.

Lama-lama cegukan bisa sangat menjengkelkan karena mempengaruhi Anda berbicara. Kondisi ini bisa berlangsung beberapa menit dan hilang dengan sendirinya.

Tetapi jika sampai lebih dari dua hari atau terus berulang selama 48 jam, maka segera lah berkonsultasi dengan dokter.

Karena cegukan yang berkepanjangan dapat menunjukkan gangguan struktural, infeksi atau inflamasi yang berdampak pada sistem saraf pusat atau saraf tertentu atau cabangnya," kata ahli gastroenterologi di Gleneagles Hospital, Dr. Amitabh Monga.

Menurut dia, gangguan ini mungkin termasuk penyakit lambung, hati, pankreas atau otak.



Lalu, bagaimana menangani cegukan?

Look mengatakan, perawatan paling sederhana untuk cegukan melibatkan beberapa mekanisme umum seperti berkumur.

Berkumur tampaknya bisa merangsang tenggorokan Anda, yang merupakan cara lain untuk mengganggu tindakan tak sadar diafragma Anda.

Menurut Monga, kemanjuran cara ini belum dapat dikonfirmasi. Walau begitu, metode ini mudah dilakukan dan memiliki risiko komplikasi yang rendah, oleh karena itu tidak ada salahnya untuk dicoba.

Kalau berkumur tak membantu, cobalah

menahan napas sesaat lalu hembuskan dan lakukan cara ini tiga atau empat kali setiap 20 menit.

Anda bisa juga menarik dan menghembuskan napas dari kantong kertas, bukan plastik. Ingat, jangan menutupi kepala dengan kantong itu.

Selain itu, saat menelan, tekan hidung Anda secara perlahan. Cara lainnya gigit lemon, atau menelan sedikit gula pasir,

Jika cegukan masih terjadi, coba duduk dan peluk kedua lutut Anda sedekat mungkin dengan dada selama beberapa waktu. Condongkan tubuh ke depan sehingga Anda menekan dada dengan lembut.

Jika tak membantu, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter karena bisa jadi ada masalah dalam kesehatan Anda. Dokter bisa meresepkan obat untuk sementara mengendalikan saraf (Ant).

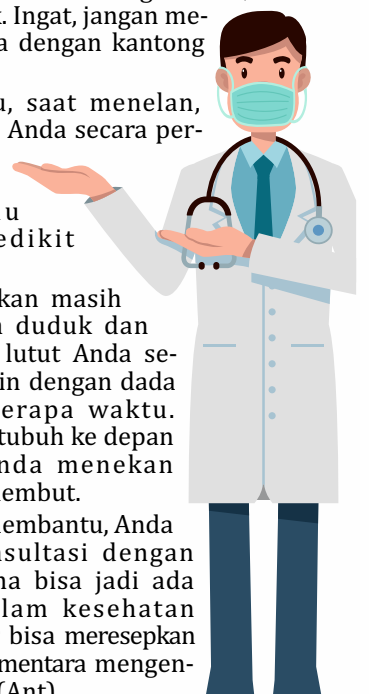




Foto : Istimewa

Setelah Samsung, Oppo juga mengisyaratkan bakal memamerkan teknologi layar gulung pada ponsel dalam acara tahunan pabrikannya China itu, INNO Day 2020.

Dikutip dari Gizmochina (Senin, 16/11/2020) dengan poster yang baru dirilis oleh Oppo tampaknya menampilkan lekuk perangkat dengan layar yang dapat digulung.

Gambar tersebut diunggah di Weibo dengan judul "Layar besar? Layar kecil? Layar tak terbatas? di masa depan, ponsel Anda mungkin bisa ditarik dengan bebas."

Oppo juga mengungkapkan hal serupa lewat unggahan di akun Twitter Oppo. "Kami telah mengeksplor bentuk baru," cuit @Oppo.

Di dalam foto poster yang diunggah terdapat tulisan "Mengantar ke era baru layar. Oppo Concept Phone." Poster tersebut juga menunjukkan bentuk ponsel dengan layar melengkung dengan tampilan yang

dapat diperpanjang atau ditarik untuk mengubah ukurannya.

Oppo bergabung dengan daftar produsen lain yang sedang menggarap ponsel dengan layar yang dapat digulung. Produsen perangkat elektronik TCL telah terlebih dulu memamerkan ponsel dengan layar yang dapat digulung pada awal tahun ini.

Prototipe perangkat yang telah berfungsi milik TCL tersebut bahkan telah bocor bulan lalu. Sementara LG juga telah mematenkan ponsel dengan desain "rollable" pada 2019, dan kemungkinan berencana meluncurkannya dalam waktu dekat sebagai salah satu produk dari Explorer Project-nya.

Tidak hanya itu, Samsung baru-baru ini juga memberi petunjuk kehadiran ponsel gulung saat wakil pimpinan perusahaan Lee Jae-yong kedatangan memegang ponsel yang belum pernah ada sebelumnya, dan diperkirakan merupakan prototipe ponsel gulung masa depan.

Awal bulan ini, paten Oppo untuk perangkat dengan layar yang dapat digulung diterbitkan oleh administrator kekayaan intelektual negara asalnya, China National Intellectual Property Administration. Berdasarkan paten tersebut, Oppo bisa saja memamerkan perangkat tersebut di acara INNO Day 2020. Unggahan Weibo Oppo dengan jelas mengatakan bahwa ponsel tersebut adalah perangkat konsep, tentu saja belum meluncur secara komersial. Hal ini berarti era ponsel layar yang dapat digulung semakin dekat (Ant).



Foto : debora cardenas / unsplash



KULIT GLOWING DENGAN PEPAYA, BISA LHO!!!

Pepaya adalah buah yang banyak tumbuh di negara tropis. Di Indonesia, pepaya merupakan salah satu buah yang mudah dicari dan harganya pun cukup terjangkau. Pepaya merupakan salah satu buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Selain baik untuk pencernaan, pepaya juga memiliki manfaat untuk kulit lho. Melansir Authority Simak berikut 4 manfaat pepaya.

Bikin kulit glowing

Pepaya memiliki enzim khusus yang disebut papain yang berfungsi sebagai exfoliator alami yang mengangkat sel kulit mati dan juga membantu perbaikan kulit. Di sisi lain, penggunaan pepaya secara teratur membantu mengunci kelembapan, mengurangi ukuran pori-pori, dan mencegah kerutan. Sisi positifnya, kamu akan mendapatkan kulit bercahaya yang selalu Anda inginkan.

Melembapkan kulit

Disaat banyaknya produk pelembab bermunculan, kamu juga bisa menggunakan pelembab alami untuk menjaga kulit dari bahan-bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping, seperti menggunakan pepaya misalnya. Pepaya dengan khasiatnya dapat menyejukkan membuat kulit kamu lembut dan kenyal. Pepaya melembapkan kulit kamu dan menjaga kelembapannya sepanjang waktu.

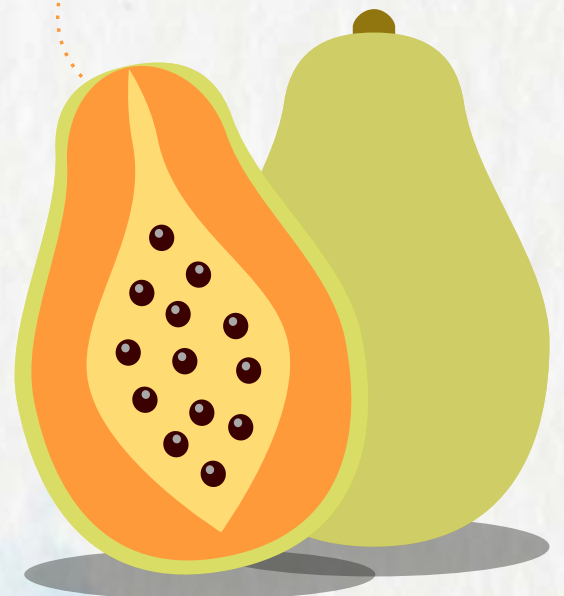
Mengurangi keriput

Ya, kulit pepaya dapat membersihkan dan mencegah kerutan dini serta menjaga kulit tetap muda dan bercahaya. Karena mengandung enzim yang mengangkat sel-sel mati dari permukaan kulit. Karotenoid yang ada dalam pepaya juga membantu melawan radikal bebas yang memecah kolagen dan elastin, yang menyebabkan kulit kendur dan keriput.

Mengurangi hiperpigmentasi

Pigmen berlebihan pada kulit memang bikin kita insecure! Tapi tenang saja, karena pepaya dapat mengatasi masalah tersebut. Buah ini sifat pengelupasan yang sangat baik. Oleh karena itu, membantu menghilangkan sel kulit mati dan mendorong pertumbuhan sel baru dengan mengobati hiperpigmentasi. (Ist)

PEPAYA



Anies Baswedan (dari hal 1)

Adanya acara kerumunan besar-besaran di wilayah Petamburan Jakarta telah menyeret Gubernurnya sendiri untuk diperiksa di kantor polisi. Anies dinilai jadi pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden di rumah Habib Rizieq.

Seusai diperiksa Anies mengaku mendapat 33 pertanyaan dari pihak kepolisian. Dia tidak banyak menjelaskan soal isi pemeriksaan maupun kasus kerumunan massa tersebut. "Saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik, dan ada 33 pertanyaan yang disampaikan menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman," ucap Anies kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman.

Anies menyerahkan soal isi pemeriksaan kepada Polda Metro Jaya. Dia hanya menyampaikan bahwa yang disampaikan saat klarifikasi sudah sesuai dengan fakta. "Semua sudah dijawab, sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi, adapun detail isi pernyataan klarifikasi dan lain-lain, nanti menjadi bagian pihak Polda Metro Jaya untuk meneruskan dan menyampaikan sesuai kebutuhan," katanya.

Pada hari ini, Polda Metro Jaya memeriksa 9 orang, di antaranya Anies Baswedan, Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara, Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana, Camat Petamburan Muhammad Yasin. "Kemudian juga ada Ketua RT serta RW setempat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Pihaknya yang batal diperiksa yakni Lurah Petamburan, Setiyanto karena reaktif corona. Lurah Petamburan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk mendapat penanganan medis. "Sekarang sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kita lakukan uji mekanisme seperti biasa, uji lanjutannya. Karena memang pada saat kita lakukan swab antigen yang bersangkutan reaktif," katanya.

Terpisah, Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, mengatakan pemeriksaan Anies dkk untuk menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam acara Habib Rizieq yang menimbulkan kerumunan. Padahal Jakarta masih menerapkan PSBB transisi dan pandemi corona masih belum usai.

"Jadi tahapannya adalah saat ini penyelidikan. Penyelidikan itu untuk menjawab satu hal ada atau tidak ada pidana. Dalam waktu 2-3 hari ke depan ini adalah tahap lidik, makanya sifatnya undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi untuk menentukan ada atau tidak adanya pidana," ucap Ade Hidayat kepada wartawan, Selasa (17/11). Menurut Ade, pihaknya tak menutup kemungkinan kembali memanggil Anies dkk dalam pemeriksaan berikutnya, apabila penyidik memerlukan keterangan tambahan.

Tak hanya ancaman hukuman pidana,

bila terbukti melanggar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjatuhkan sanksi tegas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun demikian, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Syafrizal mengungkapkan masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap Anies Baswedan terlebih dahulu.

"Kita tunggu klarifikasi dan hasil di kepolisian karena salah satu instansi yang diminta membantu menegakkan lewat penegakkan yustisi itu adalah kepolisian. Biar klarifikasi di sana dulu ya," ujarnya.

Masih dari penjelasan Syafrizal, jika sudah ada klarifikasi dari kepolisian, pihaknya baru akan melihat apakah dibutuhkan tindakan atau tidak. "Nanti hasilnya akan kita lihat apa tindakan yang bisa kita lakukan," tuturnya.

Ditanyakan kemungkinan sanksi tegas apa yang bisa dijatuhkan kepada Anies? Pihaknya pun enggan menjawab. "Saya belum bisa jawab ya. Masa mengandai-andai. Tunggu klarifikasi dulu," ujarnya. Syafrizal mengatakan, bahwa sanksi terberat yang dijatuhkan kepada kepala daerah sampai saat ini adalah teguran tertulis.

Basa Basi Denda

Terkait denda untuk Habib Rizieq senilai Rp 50 juta atas kerumunan massa dan pelanggaran protokol kesehatan menurut epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Iwan Ariawan tidak tepat. Menurutnya, langkah paling tepat adalah langsung membubarkan kegiatan yang memicu kerumunan.

"Tidak cukup (disanksi denda). Untuk selanjutnya perlu dicegah terjadi kerumunan, seperti tidak memberikan izin berkumpul dan dibubarkan jika mulai ada kerumunan orang," katanya.

Sorotan soal denda juga mencuat karena dalam acara tersebut, Satgas COVID-19 sempat membagikan 20 ribu masker dan hand sanitizer. Benarkah denda Rp 50 juta tidak sebanding dengan harga masker yang dibagikan? Pantauan di Pasar Pramuka Jakarta Timur, masker bedah 2 lapis saat ini dijual di kisaran harga paling murah Rp 40 ribu per 50 pcs. Ini artinya harga per pcs ada di kisaran Rp 800. Merk tertentu dijual dengan harga paling mahal Rp 125 ribu per 50 pcs, atau Rp 2.500 per pcs. Sementara harga hand sanitizer termurah Rp 5.000/50 ml. Artinya, denda Habib hanya cukup untuk membeli untuk 20 ribu pcs masker.

Kondisi makin runyam jika acara ini memicu kluster corona baru. Menurut Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany, denda yang dijatuhkan itu terbilang kecil mengingat dampak yang bisa ditimbulkan dalam kerumunan tersebut.

Hasbullah menjelaskan, jika terdapat 10 orang saja dalam kerumunan acara yang diselenggarakan oleh Rizieq terinfeksi Covid-19 dan harus menjalani perawatan di rumah sakit selama dua pekan lamanya, maka anggaran biaya yang dikeluarkan

negara pun tak sedikit.

Dalam studi yang dilakukannya, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk merawat pasien Covid selama 16 hari di rumah sakit yakni sebesar Rp 184 juta. Sehingga jika terdapat 10 orang saja yang dirawat, maka anggaran yang akan dikeluarkan negara pun mencapai Rp 1,84 miliar.

"Itu kan ngabisin biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk ngobatin orang yang sakit karena dia datang berkumpul. Ada fotonya di media, banyak yang enggak pakai masker," ujar dia. (ist,ins)

Zona Merah (dari hal 2)

Sulawesi Tengah 70,8 persen, Sulawesi Barat 72,62 persen. Wiku berpesan pada seluruh provinsi untuk meningkatkan pelayanan penanganan Covid-19.

Wiku Adisasmito menjelaskan terkait update kasus positif mingguan. Pada pekan ini, Wiku mengatakan perkembangan kasus Covid-19 di tingkat nasional mengalami peningkatan 17,8 persen.

Tak hanya itu, terjadi penurunan jumlah kabupaten/kota berstatus zona oranye, sedangkan jumlah kabupaten/kota zona merah Corona bertambah. "Pada pekan ini terjadi penurunan yang signifikan pada zona oranye, yaitu dari 370 menjadi 345 kabupaten/kota. Ini adalah langkah yang kita harapkan, karena sejak awal pandemi kabupaten/kota dengan zona oranye adalah paling banyak di antara zona risiko lainnya," katanya. (ist)

17 KABUPATEN/KOTA YANG NAIK DARI ZONA ORANYE KE ZONA MERAH

Sumatera Barat (Kota Payakumbuh)

Kepulauan Riau (Kota Tanjungpinang)

Lampung (Pesawaran)

Banten (Kota Cilegon),

Jawa Barat (Bandung, Tasikmalaya, Purwakarta, Kota Cimahi),

Jawa Tengah (Banjarnegara, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kendal, Tegal, Brebes),

Jawa Timur (Lumajang)

Kalimantan Tengah (Barito Timur)



AWAS! APBN INDONESIA ALAMI SYOK

Jakarta - Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian luluh lantak di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah pun dibuat pusing mengatasi masalah ini karena di saat kebutuhan anggaran gede, pendapatan negara memble.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, situasi pandemi Covid-19 telah membuat semua sektor tiarap. Dia juga mengakui APBN pun mengalami syok. "Sebetulnya APBN yang dikelola oleh Pemerintah, keuangan negara, juga mengalami syok. Namun tidak boleh dibiarkan syok itu kemudian menghancurkan seluruh hal, mulai dari kesehatan, sosial, kegiatan pendidikan. Kemudian dari sisi usaha kecil menengah dan ekonomi," ucapnya dalam acara peluncuran Program bantuan subsidi upah (BSU) untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, Selasa (17/11).

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah sadar meski APBN mengalami syok belanja negara tetap dibutuhkan di masa sulit ini. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU).

"Kita dibolehkan memiliki defisit di atas 3%. Itu karena penerimaan perpajakan kita turun. semua pembayar pajak sedang kesusahan sebagian besar. Namun belanja-belanja itu penting sekali bagi kita karena memang masyarakat tidak menunggu. Itulah yang menjadi fungsi peranan penting dari anggaran pendapatan belanja negara atau kebijakan keuangan negara," terangnya.

Penerimaan pajak per akhir Agustus 2020 anjlok hingga 15,6% secara tahunan. Totalnya penerimaan pajak baru mencapai Rp 676,9 triliun. Jumlah ini baru mencapai 56,5% dari target yang ditentukan dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun.

Meski begitu pemerintah terus menggelontorkan berbagai program bantuan sosial untuk menopang perekonomian masyarakat. Tujuannya membantu masyarakat paling rentang untuk bisa bertahan di masa sulit.

Tambah Rp 3,66 T untuk Bantuan Pendidikan

Sri Mulyani mengatakan ada tambahan sebesar Rp 3,66 triliun untuk program bantuan subsidi upah/gaji bagi tenaga pendidik honorer. "Inilah kita tambahkan

anggarnya untuk bantuan gaji guru honorer di Kemendikbud dan Kemenag. Totalnya capai lebih dari 2,4 juta orang. 1,6 juta di bawah Kemendikbud dan di bawah Kemenag 800 ribu orang," ujarnya.

Bendahara negara ini menjelaskan, total bantuan yang akan didapatkan oleh penerima sasaran sebesar Rp 1,8 juta. Bantuan subsidi gaji ini akan diberikan sekaligus. "Total bantuan juga meningkat, Rp 600 ribu x 3 bulan, ditransfer langsung ke account masing-masing. Ini diberikan sekaligus," kata dia.

Adapun bantuan ini akan diberikan kepada tenaga pendidik honorer seperti dosen, guru, non PNS, Kepala Sekolah, Pendidik Paud, pegawai Perpustakaan, lab hingga pegawai administrasi serta operator sekolah.

Dalam rapat virtual di komisi X DPR RI Nadiem menyebutkan syarat ini sangat sederhana dan efisien. "Harus warga negara Indonesia tentunya, tidak menerima bantuan subsidi dari Kemenaker agar tidak tumpang tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan Kemenaker," kata dia. Nadiem menambahkan, syarat selanjutnya adalah guru honorer tidak boleh menerima Kartu Prakerja hingga 1 Oktober 2020. (ist)

5 CAPAIAN APBN 2020

5 CAPAIAN APBN 2020

- Sektor Infrastruktur
- Pembangunan jalan baru 137,21km
- Pembangunan jembatan 3.777,6 km
- 5 pelabuhan baru
- Pembangunan jaringan irigasi yang sudah 76,10% (fisik)
- Jaringan gas 86% (target 127.865 sambungan rumah di 23 kabupaten / kota)
- Pembangunan 45 bendungan sudah mencapai 48,57% (fisik)
- Rel kereta api sepanjang 113,1 km'sp
- Rehabilitas jaringan irigasi 52,28% (fisik)
- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT) 121.690 hektare

BANTUAN SOCIAL (BANSOS)

- Bantuan sembako jabotabek 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM)
- Bantuan beras peserta program keluarga harapan (PKH) kepada 2 juta KPM
- Bantuan usaha mikro kepada 9,1 juta penerima

- Kartu sembako 19,4 juta KPM
- Penyaluran PKH 10 juta KPM
- Bansos tunai peserta sembako non PKH 9 juta KPM
- Kartu prakerja 5,5 juta penerima
- Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 7,6 juta penerima

SEKTOR PENDIDIKAN

- Program Indonesia Pintar 15,54 juta siswa Bantuan operasional sekolah (BOS) Kementerian Agama 7,0 juta siswa
- Bidikmisi / KIP kuliah 634,29 ribu mahasiswa
- Pembangunan / rehabilitasi kepada 528 sekolah dan menengah

SEKTOR SUBSIDI PEMERINTAH

- Subsidi bunga bagi kredit usaha rakyat (KUR) kepada 3,5 juta debitur
- Subsidi pupuk sebesar 6,4 juta ton
- Diskon listrik / pembebasan biaya 31,4 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM
- Bantuan perumahan 108,2 ribu unit

rumah

SEKTOR KESEHATAN

- Insentif tenaga Kesehatan untuk pusat daerah 235,8 ribu orang dan 137,7 ribu orang di daerah
- Peserta penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan nasional (PBI JKN) 96,4 juta jiwa

